

AKUNTAN DAN AKUNTANSI DALAM KACAMATA POSMODERNISME

Widia Astuty
(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ABSTRAK

Praktik akuntansi yang digunakan dalam dunia bisnis sekarang tidak lain merupakan konsep yang dibuat dan dihasilkan oleh akuntan. Praktik ini secara niscaya menciptakan dan membentuk realitas sosial (*social reality*) yang melingkupi dan hadir secara samar dalam kehidupan sosial masyarakat bisnis. Dengan kehadirannya yang samar ini, individu-individu anggota masyarakat (bisnis), secara sadar atau tidak, terperangkap dalam jaringan-jaringan kerja (*networks*) realitas sosial yang sudah tercipta tadi. Jaringan-jaringan kerja realitas sosial ini merupakan jaringan kuasa yang dengan kuasanya mampu memikat, mengikat dan memilih kehidupan sosial masyarakat ke dalam jaringan kerjanya.

Key words : Akuntan , Akuntansi, Posmodernisme

Pendahuluan

Menyadari bahwa realitas sosial mempunyai kuasa yang memperangkap individu-individu anggota masyarakat ke dalam suatu jaringan tertentu, maka suatu hal yang krusial dan patut dicermati di sini adalah: (1) realitas sosial macam apa yang harus dibentuk atau diciptakan sehubungan dengan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi, dan (2) apa serta bagaimana peran akuntan dalam upaya menciptakan realitas sosial yang dimaksud. Atensi terhadap kedua hal ini sangat penting, mengingat nasib dan destinasi individu-individu masyarakat, secara sosial, dipengaruhi dan ditentukan oleh kedua faktor tersebut.

Ketika realitas sosial yang diciptakan adalah realitas sosial yang kering akan nilai-nilai etika, maka realitas sosial semacam ini akan besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku individu untuk berperilaku sama dengan "warna" realitas sosial yang mengikatnya, yaitu perilaku yang kering akan nilai-nilai etika (*non-ethical behaviour*). Perilaku ini tentu dapat berubah bila realitas sosial yang

melingkunginya, yaitu realitas sosial yang sarat dengan nilai etika, sangat kondusif untuk mengarahkan perilaku tersebut kepada perilaku yang etis.

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji secara kritis kedua aspek tersebut, yaitu realitas sosial (dan akuntansi) dan peran akuntan, dalam kerangka analisis postmodernism. Maksud dari tulisan ini adalah (1) memberikan wawasan yang luas, cerdas, dan kritis terhadap fenomena-fenomena sosial terutama yang terbentuk melalui proses praktik-praktik akuntansi dan bisnis dengan cara "keluar" dari "perangkap logosentrisme" realitas sosial yang ada, untuk kemudian memberikan arah pembentukan realitas dan tatanan sosial yang lebih baik, (2) memberikan pandangan kritis tentang kesadaran etis (*ethical consciousness*) dan peran akuntan dalam keterlibatan aktif akuntan membentuk realitas sosial.

Posmodernisme

Posmodernisme pada dasarnya adalah sebuah *worldview* yang mencoba "meletakkan dirinya "di luar" paradigma modern dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi" (Hadiwinata 1994, 23). Posmodernisme bukanlah suatu bentuk gerakan yang utuh dan homogen di dalam dirinya sebagaimana ditemui dalam bentuk pemikiran modernisme yang selalu sarat dengan sistematika, formalitas, dan keteraturan. Sebaliknya, ia adalah sebuah gerakan yang mengandung keaneka-ragaman pemikiran "yang meliputi Marxisme Barat, strukturalisme Francis, nihilisme, etnometodologi, romantisme, populisme, dan hermeneutika" (Hadiwinata 1994, 31). Mungkin karena adanya keberagaman inilah akhirnya posmodernisme tidak mempunyai "bentuk" yang jelas. Tetapi "tidak berbentuknya" posmodernisme ini justru merupakan "bentuk" asli dari dirinya.

Gerakan ini muncul karena modernisme—sebagaimana yang diklaim oleh posmodernisme—telah menciptakan ketidakberesan dalam kehidupan manusia. Modernisme, demikian menurut Hadiwinata (1994, 23), tidak saja melibatkan penyebaran hegemoni peradaban Barat, industrialisasi, urbanisasi, teknologi, dan konsumerisme, tetapi juga melahirkan rasisme, perbedaan kaya dan miskin,

diskriminasi, pengangguran dan stagnasi. Pada posisi yang sama, Sugiharto (1996, 29-30) juga berpendapat bahwa modernisme telah menciptakan banyak konsekuensi buruk pada tatanan praksis kehidupan sosial manusia, paling tidak dalam beberapa hal, seperti:

..... pertama, pandangan dualistiknya (modernisme) yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek dan objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan sebagainya, telah menyebabkan objektivikasi alam secara berlebihan dan pengurusan alam secara semena-mena.... Kedua, pandangan modern yang bersifat objektivistik dan positivistik akhirnya cenderung menjadikan manusia seolah objek juga, masyarakat pun direkayasa sebagai mesin. Akibat dari hal ini adalah bahwa masyarakat cenderung menjadi tidak manusiawi... Ketiga, dalam modernisme ilmu-ilmu positif empiris mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Akibat dari hal ini adalah, bahwa nilai-nilai moral dan religius kehilangan wibawanya. Alhasil timbullah disorientasi moral-religius, yang pada gilirannya mengakibatkan pula meningkatnya kekerasan, keterasingan, depresi mental dan seterusnya... Keempat adalah materialisme, yaitu, bila kenyataan terdasar tidak lagi ditemukan dalam religi, maka materilah yang mudah dianggap sebagai kenyataan terdasar... Kelima, oleh sebab norma-norma religius dan moral tak lagi berdaya bagi perilaku manusia, maka norma-norma objektif pun cenderung hilang. Akibatnya, kekuasaan yang menekan dengan ancaman kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengatur manusia, (dan) ... keenam adalah bangkitnya kembali Tribalisme, atau mentalitas yang mengunggulkan suku atau kelompok sendiri (yang merupakan) konsekuensi logis ... dari hukum *survival of the fittest* (Sugiharto 1994, 29-39).

Realitas buruk yang ditampilkan modernisme tidak saja memperangkap individu-individu masyarakat ke dalam jaringan kerja realitas buruk tadi, tetapi juga membangkitkan kekecewaan yang mendalam bagi mereka yang dapat berpikir kritis dan sensitif terhadap keadaan lingkungannya. Kekecewaan ini akhirnya mengkristal sehingga menjadi suatu gerakan baru yang disebut dengan posmodernisme.

Dengan melihat realitas buruk di atas, secara tegas posmodernisme dapat menyatakan bahwa modernisme telah gagal dalam melakukan misinya—meskipun tokoh modernisme semacam Habermas tentu saja akan menyangkal dengan keras pernyataan ini. Realitas tersebut, kata Hadiwinata (1994, hal 23), sudah cukup untuk menghujat kegagalan modernisme, yaitu kegagalan modernisme dalam memenuhi janji-janjinya untuk membebaskan manusia dari kesia-siaan, ketidakpedulian, dan irasionalitas.

Logosentrisme

Kegagalan ini merupakan konsekuensi logis dari ketidakmampuan modernisme untuk melihat hakikat manusia secara utuh. Pandangan keilmuannya yang cenderung berpikir logosentrisme," yaitu sistem pola berpikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan referensi kebenaran universal dan eksternal (Rosenau 1992, hal xii). Ciri utama dari logosentrisme ini adalah: *pertama*, pola berpikir oposisi biner (dualistik, dikhotomis) yang hierarkis, seperti, esensi-eksistensi, substansi-aksiden, jiwa-badan, makna-bentuk, transenden-empiris, positif-negatif, bahasa lisan/bahasa tulisan, konsep/metafor, dan lain-lainnya, di mana bagian pertama dianggap sebagai pusat, fondasi, prinsip, dan asal-muasal dari bagian yang kedua (lihat Sahal 1994, hal 19). Adanya pemusatan ini, menurut Sahal (1994, hal 19), "mendorong filsafat Barat cenderung (bersifat) totaliter sehingga yang bukan pusat, yang partikular, yang lain dan yang berbeda harus disubordinasikan ke dalamnya". Dengan kata lain, logosentrisme cenderung "menindas" "sang lain" (*the other*, yaitu sesuatu yang lain yang berada di luar hegemoni dan kekuatan *mainstream*) yang berada dalam posisi marginal. Ini merupakan ciri khas yang melekat kuat pada tubuh modernisme, ciri arogansi yang *melecehkan* nilai-nilai, kekuatan, kekhasan, dan kelokalan yang dimiliki oleh "sang lain".

Ciri *kedua* terletak pada aspek keilmuan. Ilmu-ilmu positif produk modernisme banyak menekankan pada aspek praksis dan fungsi, dan sebaliknya, melecehkan aspek nilai (etika), yang beranjak dari keyakinan bahwa ilmu-ilmu positif adalah ilmu pengetahuan harus netral dan bebas dari nilai (*value-free*). Ini adalah

sebuah bentuk logosentrisme yang dengan kekuatan hegemoninya mengklaim bahwa ilmu-ilmu yang tidak mengikuti metode (prosedur) ilmiah (*scientific method*) yang telah diformat oleh ilmu positif/modern adalah ilmu-ilmu yang tidak ilmiah yaitu ilmu yang tidak sah dan tidak layak untuk hidup, dikembangkan, dan apalagi “dipraktikkan”.

Dalam aspek keilmuan akuntansi, juga ditemui hal serupa. Apa yang disebut dengan *positive accounting theory*, lihat misalnya karya Watts dan Zimmerman (1986,1990), boleh dikata merupakan *mainstream* dari akuntansi modern. Dari kacamata *positive accounting theory*, karya-karya atau model-model akuntansi yang berada di “luar” arus ini seperti misalnya yang ditulis oleh Tinker (1980, 1984, 1985), Tinker dkk. (1982), Tomkins dan Groves (1983), Preston (1986), Chua (1988), Mines (1988,1989a, 1989b), Laughlin (1988,1990), Arlington dan Francis (1989,1993), Francis (1990), Roslender (1992, 1996), Chua dan Degelling (1993), Alagiah dan Gaffikin (1996), Andrew dan Kaidonis (1996), Dillard dan Yuthas (1996), Ezzamel dan Hoskin (1996), dan lain-lainnya—tidak akan pernah dianggap sebagai akuntansi yang “ilmiah.” Karena karya-karya mereka ini tidak mengikuti perosedur filosofis yang sama dengan modernisme.

Hal yang sama juga akan dijumpai pada jurnal-jurnal semacam *Accounting, Organizations and Society* (AOS), *Accounting, Auditing, and Accountability journal* (AAAJ), dan *Critical Perspectives on Accounting* (CPA). Jurnal-jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang berada “di luar” *mainstream* yang diikuti oleh misalnya *Accounting Review*. Ini, sekali lagi, menandakan bahwa *positive accounting theory* dan *Accounting Review* (dan beberapa jurnal lainnya dari aliran yang sama) adalah sebuah bentuk logosentrisme dalam dunia akuntansi.

Ciri ketiga terletak pada aspek praksis. Pada aspek ini, logosentrisme juga dapat ditemui, yaitu bentuk standar dan praktik akuntansi yang mengklaim bahwa praktik akuntansi harus berlaku secara universal/ internasional. Klaim ini terwadahi dalam bentuk sebuah gerakan yang dinamakan dengan *harmonization of accounting* atau *international accounting*. Apa pun alasan dipraktikkannya *harmonization of accounting* atau *international accounting*, bagi seorang posmodernis, praktik semacam ini tetap

dianggap sebuah "kesewenangan" yang memarginalkan praktik-praktik atau nilai-nilai lokal (sebuah negara, misalnya) yang mungkin sangat sesuai dengan kondisi dan konteks kelokalan negara atau masyarakat yang bersangkutan.

Sebaliknya, bagi mereka yang kontra dengan *harmonization of accounting* atau *international accounting* ini bisa berpendapat bahwa sebetulnya bentuk praktik akuntansi sangat ditentukan oleh faktor-faktor, seperti: kultur masyarakat (Hofstede 1987; Gray 1988; Perera 1989; Riahi-Belkaoui dan Picur 1991), sistem ekonomi (Abdel-Magid 1981; Bailey 1988), sistem politik (Solomons 1978,1983; Tinker 1984; O'leary 1985; Daley and Mueller 1989), dan sistem sosial (Gambling 1974; Burchell et al. 1985). Pada tingkat mikro (organisasi), akuntansi juga telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi, seperti restrukturisasi dan perbaikan organisasi; tugas-tugas organisasi; strategi, struktur dan pendekatan dalam pembagian kerja, teknologi dan praktik; dan konflik sosial dalam organisasi (Hopwood 1987). Fakta ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kultur masyarakat, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial yang tentu banyak bersifat "lokal," mempunyai andil yang sangat signifikan dalam membentuk praktik akuntansi. Nilai-nilai lokal ini yang dikehendaki oleh posmodernis untuk tidak ditempatkan pada posisi marginal, yaitu dengan "menentang" logosentrisme *harmonization of accounting* atau *international accounting*.

Genealogi

Terhadap hegemoni logosentrisme, Michel Foucault, misalnya, melakukan sebuah pemberontakan. Baginya, hegemoni logosentrisme dengan klaim universalisme jelas-jelas mengesampingkan "sang lain" (*the other*) pada posisi "marginal", "terlupakan", "tidak berarti", atau bahkan "terhinakan". Dengan kata lain, ada bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang tertindas, disembunyikan, atau bahkan "ditiadakan" demi menjaga tegaknya sebuah wacana atau narasi besar yang sedang berkuasa secara fungsional dan sistematis.

Bagi Foucault, kemerdekaan pengetahuan-pengetahuan yang tertindas ini hanya bisa dilakukan melalui "kritik". Yaitu wacana kritik yang dapat menempatkan

pengetahuan tingkat rendah atau pengetahuan yang “tidak ilmiah” pada posisi (wacana) yang layak. Wacana kritik ini oleh Foucault dinamakan dengan “genealogi” yang mempunyai misi perjuangan melawan wacana-wacana global dan universal yang saat ini menjadi kekuatan yang sedang berkuasa (Foucault 1980, 82). Foucault (1987, hal 221) juga mengartikan genealogi ini sebagai suatu proses sejarah yang tidak linear. Artinya bahwa terbentuknya sejarah (realitas sosial) sebetulnya tidak melalui suatu proses linear yang menuntun kepada tujuan tertentu, tetapi melalui suatu proses yang polivalen dan "acak" yang menuntun kepada tujuan yang benar-benar belum diketahui secara pasti. Secara implisit, pengertian ini mempunyai makna bahwa genealogi memberikan fleksibilitas dan kebebasan yang penuh dalam melihat fenomena atau realitas sosial yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Ini tentu sangat berbeda dengan pandangan seorang modernis-positivistik dalam melihat realitas sosial sebagai suatu bentuk tatanan sosial yang konkret, formal, dan pasti.

Bagi pemikiran Foucault, wacana “global” dan “universal” adalah bentuk logosentrisme yang memiliki kuasa (*power*). Hal ini bukan sesuatu yang aneh, karena Foucault (1980, hal 98) beranggapan bahwa kuasa tidak hanya terpusat dan terkonsentrasi pada para penguasa yang sedang berkuasa dalam organisasi-organisasi formal seperti negara, perusahaan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi agama, dan lain-lainnya, tetapi juga masuk ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan (*knowledge*). Tambahan lagi, Foucault berpendapat bahwa terdapat hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara ilmu pengetahuan dan kuasa. Kuasa terartikulasi dalam pengetahuan, dan pengetahuan terartikulasi dalam kuasa. Hubungan ini tidak hanya dalam bentuk hubungan dua unsur yang berbeda, tetapi juga dalam pengertian "fusi." Artinya, kuasa itu sendiri adalah (mengandung) pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri terdiri dari kuasa (Foucault 1980, 52).

Dekonstruksi

Dari uraian-uraian tersebut di atas akhirnya dapat dimengerti bahwa logosentrisme sebagai produk modernisme mempunyai ciri "penunggalan" yang berpijak pada hal-hal yang bersifat universal dan mengsubordinasikan "sang lain" yang berada di "luar" dirinya. Bentuk penunggalan seperti ini, dalam pandangan posmodernisme adalah bentuk yang tidak dibenarkan.

Di bidang (ilmu) ekonomi, dekonstruksi berarti menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar (logosentrisme) sistem ekonomi modern semacam efisiensi, produktivitas, maksimalisasi laba, dan akumulasi modal. Aspek-aspek lain yang berada pada posisi marginal itu antara lain: pedagang asongan, pedagang kaki lima, industri kecil, gelandangan, kaum pengangguran, pengemis, dan kelompok *non-elite* lainnya. Posmodernisme dengan semangat dekonstruksinya berusaha menempatkan kelompok marginal ini ke posisi yang sejajar dengan kelompok yang berada dalam posisi pusat (lihat Hadiwinata 1994, hal 29; Procacci 1991, hal 152). Dengan demikian, posmodernisme mengakui dan berusaha menciptakan "kemajemukan" dengan menempatkan "sang lain" pada relasi yang bersifat terbuka, demokratis, kooperatif, humanis, dan terdesentralisasi ke dalam wacana yang semula didominasi dan dikuasai oleh logosentrisme golongan elite semacam konglomerat, kapitalis, dan penguasa. Dengan cara semacam ini, tatanan sosial dan jaringan kerja yang ada di dalamnya akan bekerja secara lebih baik, lebih demokratis, dan egalitarian dibanding dengan dari tatanan sosial modern.

Pendek kata, mengutip apa yang dikemukakan oleh Hadiwinata (1994, hal 30), posmodernisme adalah sebuah bentuk "gerakan budaya (yang)] ... merupakan ...otokritik dalam filsafat Barat yang mengajak kita untuk melakukan perombakan filosofis secara total untuk tidak lagi melihat hubungan antarparadigma maupun antarwacana sebagai suatu "dialektika" seperti yang diajarkan Hegel... Gerakan baru ini mengajak kita untuk melihat hubungan antarwacana sebagai hubungan "dialogis" yang saling memperkuat satu sama lain." Atau, dengan kata lain, posmodernisme menolak adanya penunggalan dan, sebaliknya, mengakui adanya kemajemukan, serta sekaligus

melihat hubungan kerja dalam kemajemukan itu sebagai hubungan kerja yang sinergis, yaitu hubungan yang saling memperkuat antara yang satu dengan yang lain.

Akuntansi dalam Panggung Politik?

Posmodernisme "versi" Foucault (1980) terutama yang diartikulasikan dalam *Power/ Knowledge*-nya jelas-jelas mengatakan bahwa ada hubungan timbal-balik antara kuasa dan pengetahuan atau bahkan dikatakan bahwa kuasa adalah pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri adalah kuasa.

Dalam kajian mikro individual atau "diri" (*self*), pengetahuan dapat memengaruhi atau membentuk pola berpikir individu yang bersangkutan. Pola pikir ini, setelah melalui proses interaksi internal dan eksternal, direfleksikan dalam bentuk buah pikiran dan aksi. Buah pikiran dan aksi ini, adalah kuasa atau, memiliki kuasa yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan membentuk realitas sosial maupun pengetahuan itu sendiri. Proses ini berjalan terus tanpa henti, sehingga kuasa, disadari atau tidak, hadir secara samar.

Pada skala makro, pengetahuan dengan kuasa yang kuat akan mampu membentuk tatanan sosial yang kuat pula dan, bahkan, memperangkap individu-individu anggota masyarakat ke dalam jaringan kuasa dan pengetahuan yang bersangkutan. Hadiwinata (1994), misalnya, menyajikan metafor yang *apik* tentang kuasa dan pengetahuan sistem ekonomi kapitalis sebagai produk modernisme. Untuk menggambarkan hal ini, ia menggunakan metafor "*theatrum politicum*" (panggung politik), yaitu "pertemuan antara bermacam-macam karakter dalam berbagai wacana yang telah diatur sedemikian rupa, oleh para pengatur laku" (Hadiwinata 1994,24). Bagi Hadiwinata, kapitalisme dalam kenyataannya tidak beda dengan "panggung politik", yaitu sebuah ajang yang menunjukkan bahwa:

Kepuasan akan terjadi apabila para pelaku yang terlibat di dalamnya dapat memainkan perannya masing-masing dengan baik seperti yang diinginkan oleh para pengatur laku. Dalam konteks ini, para pemainnya adalah pemilik modal, buruh, dan negara; sedangkan yang bertindak selaku-sutradaranya adalah tokoh-

tokoh seperti Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, John Maynard Keynes, Max Weber, Paul Samuelson, Joseph Schumpeter, F. A. Hayek dan lain-lain.

Hadiwinata (1994, hal 25) selanjutnya berpendapat bahwa kepentingan para pelaku dan pengatur laku dipersatukan oleh kekuatan (kuasa) hegemoni kapitalisme yang terwujud dalam bentuk maksimalisasi laba, akumulasi kapital, produksi massa, dan konsumerisme.

Interaksi yang dilakukan oleh para pelaku membuahkan realitas sosial dengan tatanan ekonomi kapitalis sebagaimana dikehendaki oleh para sutradaranya. Tatanan ini begitu kuatnya, sehingga mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan hegemonis yang mengesampingkan "sang lain" (misalnya, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam, dan lain-lain) di luar orbitnya. Perilaku pemain, karena begitu kuatnya hegemoni ini, benar-benar menyatu dengan "karakter" yang dikehendaki oleh sutradara. Bahkan, perangkat kehidupan lainnya seperti bentuk dan struktur organisasi, instrumen sistem informasi organisasi, *skill* dan pengetahuan yang ditanamkan pada sumber daya manusia, dibuat dan dibangun sedemikian rupa berdasarkan jiwa hegemoni kapitalisme.

Akuntansi dalam Perangkap Kapitalisme

Kapitalisme sebagai pengetahuan dengan kuasa yang kuat mampu membentuk, seperti yang disinggung di atas, pola pikir seorang individu menjadi pola pikir yang kapitalis. Dari pola pikir semacam ini, konsekuensinya, akan menghasilkan pengetahuan dan aksi (serta perilaku) dengan warna kapitalisme. Semuanya akan berinteraksi sedemikian rupa sehingga akhirnya terbentuk realitas sosial dengan nilai-nilai kapitalisme sebagai warna utama.

Karena realitas sosial telah terbentuk dengan nilai-nilai kapitalisme, maka mau tidak mau akuntansi akhirnya juga mempunyai warna yang sama dengan realitas sosial yang mengitarinya. Mengapa demikian? Karena akuntansi dibentuk oleh faktor kultur masyarakat, sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, dan bentuk organisasi.

Karya Bailey (1988; 1990), dalam hal ini, cukup memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk akuntansi yang dipraktikkan di negara-negara sosialis. Dari penelitian Bailey terungkap bahwa akuntansi yang dipraktikkan di negara-negara tersebut ternyata sarat dengan nilai-nilai sosialis yang tentu sangat berbeda dengan kapitalisme. Sedangkan karya Watts dan Zimmerman (1986) dalam bukunya yang berjudul *Positive Accounting Theory* juga memberikan gambaran yang jelas tentang sistem ekonomi kapitalis yang mempunyai pengaruh kuat dalam membentuk praktik-praktik akuntansi khususnya di negara-negara yang menggunakan sistem ini.

Dari karya Bailey (1988,1990) dan Watts dan Zimmerman (1986) dapat dilihat bahwa faktor sistem politik (ideologi) dan ekonomi adalah faktor-faktor penentu yang mempunyai andil besar dalam memberikan kontribusi warna dan bentuk akuntansi. Ketika misalnya, penguasa dari suatu negara "terperangkap" untuk memilih sistem politik sosialis, maka pilihan untuk menggunakan sistem ekonomi sosialis adalah menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan; demikian juga akuntansi yang akan digunakan sebagai instrumen sistem ekonomi yang bersangkutan. Namun sebaliknya, bila pilihan itu jatuh pada kapitalisme, maka tidak ada pilihan lain untuk tidak menggunakan akuntansi kapitalis.

Karena saat ini yang sedang menjadi logosentrisme adalah ideologi kapitalisme, maka adalah suatu hal yang logis bila akuntansi kapitalis (dalam hal ini adalah akuntansi positif) juga akhirnya menjadi logosentrisme. Begitu kuatnya hegemoni yang ditanamkan oleh akuntansi positif, sehingga Hines (1989b, hal 60) pernah menyatakan,

Sungguh, sangat sulit dibayangkan bagaimana perusahaan-perusahaan bisa eksis tanpa akuntansi keuangan. Tanpa akuntansi keuangan, perusahaan-perusahaan tidak mungkin dapat diukur. Dari mana kategori-kategori tertentu bisa diperoleh, yang dengannya kita bisa memikirkan, mengakui, dan membuat keputusan serta melakukan tindakan berdasarkan kategori-kategori tersebut, jika tidak dari akuntansi keuangan? Apa jadinya "posisi keuangan" (*financial position*) atau "kinerja" (*performance*) atau "besar"nya (*size*) perusahaan tanpa akuntansi keuangan? Tanpa konsep "aktiva" (*assets*), "utang" (*liabilities*), "modal" (*capital*) dan "laba" (*profit*),

pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, kinerja dan ukuran perusahaan akan sulit dijawab. Sulit membayangkan dunia ekonomi tanpa akuntansi keuangan (dan manajemen)... tanpa akuntansi keuangan, atau ketiadaannya, seperangkat alternatif praktik-praktik sosial, masyarakat seperti yang kita ketahui sekarang, tidak akan eksis.

Pernyataan Hines ini, kalau tulisannya yang berjudul *The Sociopolitical Paradigm in Financial Accounting Research* dibaca secara cermat, sebetulnya adalah pernyataan yang menggunakan gaya sinisme, karena dia sendiri memberikan kritik-kritik tajam terhadap akuntansi positif yang mengklaim dirinya sebagai praktik yang independen, netral, dan bebas dari nilai. Klaim-klaim semacam ini merupakan klaim yang khas yang banyak ditemui pada akuntansi positif dan ilmu-ilmu positif lainnya termasuk ilmu ekonomi kapitalis. Dan, klaim ini memang merupakan logosentrisme dalam ilmu-ilmu positif produk modernisme.

Oleh karena itu, selanjutnya Hines (1986b, hal 61) mengingatkan bahwa praktik dan standard akuntansi yang berpengaruh terhadap ukuran, kinerja, dan kesehatan perusahaan, memengaruhi perilaku dan realitas sosial, tidak terlepas dari campur tangan politik yang boleh jadi bersifat kontroversial dan bertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sejak penetapan standard (standard-setting), akuntansi mulai dimengerti sebagai kegiatan politik, pihak profesi akuntansi dan badan yang menetapkan *standard (standard-setting boards)* menghadapi masalah dalam mempertahankan “kesucian” pengertian bahwa akuntansi secara independen dan netral “mengukur” realitas.

Pada skala mikro, kita akan melihat bahwa akuntansi positif merupakan anak dari sistem ekonomi kapitalistik. Ciri maksimalisasi laba dan akumulasi kapital merupakan identitas utama yang tidak dapat dipisahkan dari akuntansi. Maksimalisasi laba, misalnya, akan terlihat pada the *bottom line* dari Laporan Rugi-Laba (*Income Statement*) dengan nama Laba Bersih (*net profit*). Laba bersih yang tinggi merupakan tujuan utama (manajemen) perusahaan yang juga menjadi kepentingan bagi pemilik perusahaan/ pemegang saham (*shareholders*), investor, dan kreditor. Semakin tinggi angka

akuntansi (*accounting number*) yang menempel pada laba bersih, maka semakin baik kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan ciri akumulasi kapital akan tampak pada Neraca dengan label Laba yang Ditahan yang merupakan bagian dari Ekuitas (*Equity*), atau dilaporkan secara khusus dalam Laporan Laba yang Ditahan (*Retained Earning Statement*). Atau, akumulasi kapital itu berupa Ekuitas itu sendiri beserta komponen-komponennya seperti modal saham (biasa atau *preferen*), agio/disagio saham, laba yang ditahan, dan lain-lainnya. Semakin besar komposisi ekuitas ini terhadap jumlah hutang, maka semakin aman investasi yang ditanamkan oleh investor (atau kreditor) pada perusahaan. Ini merupakan ilustrasi sederhana dari dua ciri utama akuntansi yang menonjol.

Analisis-analisis tertentu seperti analisis rasio (profitabilitas, rentabilitas, aktivitas, solvabilitas, dan likuiditas) juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) untuk menilai perusahaan. Sepintas, kita dapat melihat bahwa alat-alat analisis ini sebetulnya juga tidak terlepas dari hegemoni kapitalisme. Suatu hal yang logis bila akhirnya perilaku dan aksi (tindakan) *stakeholders* merupakan perilaku dan aksi kapitalistik. Hal ini demikian, karena informal yang digunakan oleh *stakeholders* adalah angka-angka akuntansi (*accounting numbers*) yang disajikan dalam laporan keuangan dan alat analisis yang dipakai juga mempunyai nilai yang sama.

Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, akhirnya angka-angka akuntansi menjadi angka-angka yang “sakral” yang dianggap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui pengambilan keputusan ekonomi. Dan, sebagai penyedia informasi, akuntansi juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan manajemen (*management control*), alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, alat untuk menurunkan *agency costs*, dan lain sebagainya.

Hegemoni akuntansi positif yang kapitalistik begitu kuat, sehingga ketika seseorang membicarakan akuntansi dalam konteks sosial, organisasi, politik, dan filsafat, atau mengajukan bentuk akuntansi lain, maka hal tersebut akan sulit diterima. Karena semuanya, berada di luar orbit logosentrisme akuntansi positif.

Akuntan dan Akuntansi dalam Peran Cipta Realitas Sosial Humanitas

Kapitalisme, akuntansi, dan masyarakat kapitalistik merupakan refleksi, atau hasil dari eksternalisasi, sifat “diri”. “Diri” pada dasarnya memiliki dua sifat yang kontradiktif, yaitu sifat egoistik (*egoistic, selfish*) yang selalu mementingkan diri sendiri, dan sifat altruistik (*altruistic*) yang mendahulukan kepentingan orang lain. Kedua sifat ini memengaruhi cara berpikir, perilaku, dan aksi yang dilakukan oleh “diri”.

Pada saat sifat egoistik sangat dominan dibanding dengan sifat altruistik, maka sifat ini menstimulasikan pikiran “diri” untuk bertindak, membentuk konsepsi ekonomi dan akuntansi secara teoretis ataupun praktis, dan membangun struktur dan sistem yang dapat membumikan secara mapan konsep-konsep tadi.

Akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk menstimulasikan terbentuknya realitas sosial yang humanis. Namun, untuk menjadikannya demikian tidak terlepas dari keterlibatan "diri" akuntan sebagai arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bentuk bangunan akuntansi. Seperti telah diketahui secara umum, akuntan mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi dan konvensi-konvensi — misalnya metode penyusutan, metode penilaian persediaan, metode pengakuan pendapatan dan beban dan lain-lainnya—untuk menggambarkan realitas sosial (organisasi). Dan, akuntan dengan konsep-konsepnya tersebut "mereduksi realitas sosial yang sangat kompleks tadi dalam bentuk angka-angka, yaitu angka-angka akuntansi (*accounting numbers*). Angka-angka ini akhirnya dikonsumsi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya akuntansi mempunyai kuasa untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Dan, perlu diketahui, bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen, kreditor, dan investor, akan membentuk realitas yang “baru”, di mana realitas ini pada gilirannya akan menjangkit orang untuk masuk ke dalam jaringan-jaringan kerjanya. Realitas “baru” ini beserta jaringan-jaringan kerjanya juga secara dinamis berinteraksi dengan jaringan-jaringan kerja yang lain—seperti, sistem ekonomi, sistem politik, kultur masyarakat, *legal system*, dan sistem sosial—yang dalam bentuk lebih makro

juga akan membentuk realitas sosial dengan warna tertentu. Ketika akuntan membangun akuntansi dengan asumsi-asumsi, konvensi-konvensi, dan teori-teori yang "bebas nilai" (*value free*) (sebagaimana diklaim oleh akuntansi positif yang merupakan produk modernisme), maka akuntansi yang diciptakan akan menggiring para penggunanya kepada keputusan dan tindakan yang juga "bebas nilai". Dan akhirnya, realitas yang tercipta adalah realitas yang "bebas nilai" (atau kering dari nilai-nilai etika, misalnya), yang dengan jaringan-jaringan kerjanya memperangkap individu-individu dalam masyarakat (dalam skala-mikro dan makro) ke dalam realitas yang "bebas nilai". Dengan kata lain, realitas ini mengitari kehidupan individu-individu anggota masyarakat yang secara pasti akan membentuk perilaku dan kepribadian individu-individu yang bersangkutan dengan karakter yang sama dengan realitas sosial yang menjadi lingkungannya. Yang cukup memprihatinkan di sini adalah bahwa realitas semacam ini sudah dianggap sebagai realitas yang sejati, padahal dalam realitas tersebut, yang merupakan produk dari modernisme, sedang terjadi proses dehumanisasi (Sahal 1994, hal 14).

Untuk keluar dari realitas sosial yang kering dengan nilai-nilai etika (yang dibentuk oleh akuntansi positif) ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Di sini diperlukan pemikiran yang *intens* agar bisa keluar dari jaringan-jaringan kerja yang sudah mapan dan dominan; keluar untuk melihat realitas sosial dalam perspektif yang lebih luas dan kemudian melakukan suatu perubahan. Upaya semacam ini sudah mulai tampak dengan munculnya Akuntansi Interpretif dan Akuntansi Kritis. Perubahan bisa saja terjadi, terutama yang dilakukan oleh Akuntansi Kritis. Karena Akuntansi Kritis membawa misi emansipatoris di samping memiliki kesadaran ontologis yang sama dengan Akuntansi Interpretif. Berbeda dengan Akuntansi Kritis, Akuntansi Interpretif tidak membawa misi emansipasi, melainkan tetap mempertahankan status *quo*. Namun di sisi lain, Akuntansi Interpretif berusaha memberikan kesadaran ontologis bahwa realitas sosial—praktik-praktik akuntansi, misalnya—sebenarnya secara sosial diciptakan oleh manusia, bukan sesuatu yang sudah ada (*given*) "di luar sana" dan diterima secara *taken for granted* (lihat Chua

1986). Dengan kata lain, Akuntansi Interpretif ingin menunjukkan bahwa realitas sosial sebetulnya tidak pernah objektif dan tidak pernah pula independen atau bebas dari nilai manusia yang menciptakannya. Jadi, realitas sosial adalah subjektif.

Usaha untuk keluar dari realitas yang diciptakan oleh akuntansi positif juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh posmodernisme, yaitu dengan pendekatan kontemplasi dan dekonstruksi. Dalam hal ini Hadiwinata (1994, 23) mengatakan bahwa:

Posmodernisme meletakkan dirinya “di luar” paradigma modern dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi.

Kontemplasi—dalam arti melakukan suatu bentuk pemikiran rasional yang melibatkan “hati nurani” tentang realitas yang diciptakan oleh modernitas—dan melakukan dekonstruksi—dalam arti memasukkan “sang lain” (yang selama ini dalam pandangan modernisme dalam posisi marjinal) ke dalam orbit yang harus, atau patut, diperhitungkan—adalah suatu hal yang sangat perlu dilakukan di bidang akuntansi. Ini adalah suatu upaya perubahan, yaitu suatu upaya perubahan akuntansi dan realitas sosial yang diciptakannya dalam wajah yang lebih humanis. Untuk itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu “diri” akuntan dan akuntansi (dalam bentuk teori atau praktik).

“Diri” Akuntan

Morgan (1988, hal 482) secara eksplisit telah menegaskan bahwa hasil penafsiran akuntan (atau non-akuntan) terhadap realitas (misalnya, laporan keuangan) akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*reconstruction of reality*), karena laporan keuangan (di mana di dalamnya terdapat informasi akuntansi) dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang. Melihat begitu besarnya pengaruh akuntansi dalam membentuk realitas, Morgan (1988) secara kritis memberikan pandangan bahwa sebaiknya akuntan tidak

melihat sendiri sebagai agen yang pasif (*a passive agent*) yang cuma mempraktikkan bentuk teknik (*technical craft*) akuntansi, tetapi hendaknya menganggap dirinya sebagai agen yang merupakan bagian dari, atau secart aktif terlibat dalam proses pembentukan realitas sosial, yang mampu menginterpretasikan akuntansi sebagai realitas di mana maknanya (*the meanings of the reality*) akan menjadi sumber bagi pembentukan (kembali) realitas sosial. Namun, pandangan apakah akuntan adalah agen yang aktif atau pasif sangat bergantung pada persepsi akuntan itu sendiri tentang hakikat dirinya (*human nature*) dan bagaimana dia melihat realitas. Burrell and Morgan (1979, hal 2), dalam hal ini, mengungkapkan bahwa sebagian individu menganggap diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sebagai produk dari, dan secara mekanis serta deterministik ditentukan oleh lingkungan mereka. Dengan demikian, mereka cenderung memahami realitas sosial (lingkungan) sebagai struktur yang tetap, konkret dan keras, serta berdiri secara bebas dari pemikiran dan perasaan individu (manusia), dan memandang individu sebagai makhluk yang lahir dan hidup dalam realitas yang “sudah ada”. Sebaliknya, yang lain beranggapan bahwa diri mereka adalah individu yang memiliki *free-will*, yang mempunyai kapasitas untuk mencipta secara aktif lingkungan (realitas) mereka. Mereka menyadari bahwa dirinya adalah pencipta dan pengendali dari realitas yang telah diciptakannya. Mereka memahami realitas sosial ini sesungguhnya tidak lebih dari nama-nama, label-label dan konsep-konsep yang digunakan secara aktif untuk membangun realitas sosial (Burrell dan Morgan 1979, hal 4; Morgan dan Smircich 1980; Tomkins dan Groves 1983).

Pada posisi yang sama, yaitu dengan melihat penting pengaruh informasi akuntansi terhadap pembentukan realitas, Francis (1990, hal 7) akhirnya juga mengklaim bahwa akuntansi adalah sebuah praktik moral. Hal ini demikian, karena akuntan dapat mengubah dunia dan memengaruhi pengalaman hidup orang lain dengan cara yang menyebabkan pengalaman hidup seseorang menjadi berbeda dengan tidak adanya (*absence*) akuntansi atau adanya (*presence*) bentuk alternatif akuntansi.

Dari pernyataan Francis (1990), Morgan (1988), Burrell dan Morgan 1979) di atas, kita juga semakin memahami bahwa "diri" akuntan adalah faktor terpenting dalam menentukan warna dan bentuk akuntansi (dan realitas sosial yang akan dibentuknya). "Diri" akuntan, dalam paradigma modernisme, selalu dituntut untuk berpikir "rasional" dalam membuat asumsi-asumsi, konvensi-konvensi, dan teori-teori akuntansi, atau perangkat-perangkat lainnya dalam akuntansi. "Berpikir rasional" atau "rasio" merupakan jargon utama yang digunakan sejak zaman Pencerahan. Rasio dapat dipandang sebagai alat yang digunakan untuk mencapai kedewasaan, yaitu situasi kemandirian "diri" atau pembebasan "diri" dari otoritas yang berada di luar dirinya.

Rasio adalah penggerak jalannya sejarah (realitas sosial). Dengan kata lain, sejarah, menurut pandangan Hegelian, merupakan perwujudan dari rasionalitas yang bergerak secara dialektis yang bergerak ke arah pencapaian totalitas dan kesempurnaan rasio: Gerak dialektis ini, sekali lagi dari pandangan Hegelian, merupakan klaim universalitas, karena dialektika akan menyedot "sang lain" (yang berada di luar orbit) ke dalam orbitnya. Sehingga "sang lain," yaitu segala sesuatu yang berbeda, bersifat oposisi, dan kontradiksi, semuanya akan lebur melalui gerak dialektis menuju totalitas dan kesempurnaan rasio (Sahal 1994, 13).

Dari semuanya ini menandakan bahwa penggunaan rasio dalam wacana kemodernan merupakan elemen sentral dan salah satu bentuk logo-sentrisme yang tidak dapat ditinggalkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek keilmuan. Ini juga merupakan suatu indikator bahwa konstruksi, bentuk, dan praktik akuntansi merupakan perwujudan dari gerak rasionalitas menuju pencapaian totalitas dan kesempurnaan hidup manusia.

Rasio, dalam wacana kemodernan, sudah menjadi mitos bahwa rasio adalah alat tunggal dan hanya dengan rasiolah manusia akan mampu mencapai kesempurnaan hidup. Penggunaan "sang lain" sebagai alternatif atau sebagai pelengkap rasio tidak akan pernah eksis, karena dengan gerak dialektis, seperti yang dikemukakan oleh Hegel, "sang lain" akan lebur ke dalam, atau bahkan, tersingkir dari orbit rasio yang memiliki kuasa yang sangat kuat.

Hal semacam ini, menurut posmodernisme, adalah suatu bentuk kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, secara moral, posmodernisme mempunyai kewajiban untuk melakukan dekonstruksi, dalam arti memasukkan “sang lain” ke dalam orbit wacana yang sedang dominan. “Sang lain” di sini adalah “hati nurani”. Hati nurani adalah sebuah *locus* yang dapat memberi sinyal-sinyal kepada “diri” manusia bahwa apa yang akan dilakukan oleh dia adalah baik (atau buruk) dan benar (atau salah). Dengan kata lain, hati nurani adalah tempat bertanya apakah tindakan yang akan dilakukannya itu sesuai dengan fitrah kemanusiaannya yang sejati atau tidak. Hati nurani dimiliki setiap manusia, mempunyai sifat untuk selalu cenderung kepada kebenaran. Untuk mengasah ketajaman dan kepekaan fungsi dari hati nurani ini bisanya dalam ajaran agama, selalu diasah dengan melakukan ibadah-ibadah ritual dan kontemplasi esoteris yang sangat *intens*. Ketajaman dan kepekaan hati nurani ini bergantung pada keseriusan usaha yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan.

Hati nurani, jika dipahami lebih mendalam, merupakan “api” yang memancarkan cahaya etika dari dalam “diri” manusia. Ketika api ini padam, maka lenyap pulalah cahaya etika yang memancar dari kalbu. Dan ketika cahaya etika ini lenyap dari “diri” seseorang, maka lenyap pulalah praktik kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-nilai etika. Oleh karena itu, di sinilah sebetulnya letak pentingnya memasukkan hati nurani sebagai “sang lain” ke dalam wacana kehidupan sehari-hari. Jadi, secara ideal, setiap manusia harus mampu menghidupkan nyala api etika yang ada dalam dirinya, termasuk “diri” akuntan.

“Diri” akuntan yang posmodern adalah “diri” yang memiliki api etika, yang dengan api ini ia mampu menginteraksikannya dengan rasio. Sehingga dengan interaksi ini (interaksi antara hati nurani dan rasio) akhirnya akan diperoleh “wujud konkret etika” yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud konkret etika di sini tidak lain adalah ilmu pengetahuan, apapun wujud dari ilmu pengetahuan tersebut, termasuk akuntansi. Tegasnya, hati nurani adalah bersemayam dalam diri seseorang, yang dengan ketajaman dan kepekaannya selalu berusaha untuk berinteraksi dengan, dan memberikan pegangan etis kepada rasio dalam mengarahkan setiap aksi konkret (tindakan nyata) maupun abstrak (yaitu,

mengonstruksi ilmu pengetahuan). Sedangkan ilmu pengetahuan, sebagai produk dari interaksi internal antara hati nurani dan rasio, adalah bentuk "konkret" nilai etika. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah bentuk hukum positif etika, bersifat eksoteris, yang berfungsi memberikan arah dan pedoman atas setiap tindakan praktis yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, ketika "diri" akuntan posmodern menginteraksikan hati nurani dan rasionya, maka pengetahuan (teori) akuntansi yang dikonstruksinya tidak lain adalah "hukum positif akuntansi yang mengandung nilai-nilai etika. ("Hukum positif") akuntansi yang eksoteris ini akan menjadi suatu bentuk praktik akuntansi yang benar-benar sarat dengan nilai-nilai etika bila secara kontinu tetap berinteraksi dengan hati nurani (dan rasio) sebagai unsur esoteris. Bila kondisi semacam ini terpenuhi, maka realitas sosial yang tercipta adalah realitas sosial humanis yang sarat dengan nilai-nilai etika, yang pada akhirnya, juga akan menjangkau individu-individu anggota masyarakat dalam ikatan jaring-jaring etika.

Akuntansi Syariah: Merekonstruksi Akuntansi

Seperti telah diketahui bahwa interaksi internal yang intens antara hati nurani dan rasio akan menghasilkan pengetahuan (teori) akuntansi yang sarat nilai etika. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seseorang dapat mengonstruksi pengetahuan (teori) akuntansi, yang mampu menghasilkan praktik-praktik akuntansi yang sarat dengan nilai etika? Untuk menjawab pertanyaan ini, pendekatan filosofis-epistemologis sangat diperlukan.

Akuntansi Syariah dalam hal ini, menawarkan pendekatan filosofis untuk merekonstruksi akuntansi. Akuntansi Syariah pada dasarnya adalah "bentuk" akuntansi (yang "belum" memiliki bentuk) yang memberikan alternatif filosofis dalam upaya "merekonstruksi" akuntansi. Akuntansi Syariah sendiri dibangun dengan nilai-nilai agama (Islam). Namun ini bukan berarti bahwa Akuntansi Syariah bersifat sektarian, karena ia bersifat terbuka (*all inclusive*), "membumi" (dalam arti sesuai dengan karakter manusia), dan mengandung nilai-nilai universal serta lokal (Triuwono, 1996).

Nilai filosofis yang secara mendasar terkandung di dalamnya adalah filsafat (nilai) “berpasangan”. Filsafat “berpasangan” ini pada hakikatnya memandang bahwa pola sistem berpikir oposisi biner, pada saat sekarang ini, sudah tidak tepat lagi untuk tetap digunakan dalam kehidupan yang semakin kompleks dan global. Seperti telah pernah disinggung sebelumnya, pola berpikir oposisi biner cenderung untuk selalu bersikap "saling meniadakan" , yaitu meniadakan “sang lain” yang berbeda dengan yang di “pusat”, yang akhirnya cenderung untuk menciptakan suatu “penunggalan”. Sebaliknya, filsafat “berpasangan” menganggap bahwa segala sesuatu yang berbeda itu sebetulnya adalah suatu potensi yang akan memiliki kuasa yang sangat besar bila elemen-elemen yang berbeda tadi saling mengisi dan memperkuat. Dengan kata lain, filsafat “berpasangan” menolak adanya “penunggalan”, tetapi sebaliknya mengakui adanya “kemajemukan”.

Akuntansi Syariah dengan filsafat “berpasangan”nya itu sebetulnya menawarkan langkah-langkah dekonstruksi terhadap pola pemikiran akuntansi modern. Pada tatanan filosofis, misalnya, Akuntansi Syariah melakukan langkah-langkah dekonstruksi pada setiap lapisan filsafat keilmuan, yaitu pada lapisan hakikat manusia (*human nature*), ontologi (*ontology*), dan epistemologi (*epistemology*) (Burrell dan Morgan, 1979).

Pada lapisan hakikat manusia (*human nature*), Akuntansi Syariah memandang bahwa, pertama, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bebas dan sekaligus terikat. Ini artinya bahwa manusia mempunyai kebebasan yang penuh dalam usaha mengaktualisasikan potensi yang ada dalam dirinya, namun pada saat yang bersamaan ia secara moral harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Pandangan ini tentu berbeda dengan modernisme yang melihat hakikat manusia pada dua sifat yang antagonistik—yaitu terikat (determinism) (pasif) dan bebas (voluntarism) (aktif)—dan saling meniadakan. Kedua, manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat atau kapasitas “ketuhanan” dan “kemakhlukuan” yang dengannya manusia di utus ke bumi untuk menciptakan dan menebarkan kesejahteraan atau kebaikan untuk seluruh makhluk. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa semua tindakannya harus dikonfirmasi dengan kapasitas “ketuhanan” yang dimiliki,

yang dalam hal ini terutama adalah “hati nurani”. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang logis bila manusia tersebut adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dalam tindakan konkret dan abstrak serta sekaligus mengikatkan diri pada “hati nurani” agar segala tindakannya selalu berpijak pada nilai “ketuhanan”, yaitu nilai-nilai etika.

Pada lapisan kedua, yaitu ontologi, Akuntansi Syariah mempunyai anggapan bahwa realitas sosial adalah wujud konkret dari ide yang dimiliki oleh seseorang, di mana realitas sosial ini dibentuk melalui proses interaksi sosial yang tanpa henti. Pandangan ini berbeda dengan modernisme yang memandang realitas sosial dari dua titik pandang. Yang pertama menganggap bahwa realitas sosial itu tidak lain adalah nama-nama, label-label, dan ide-ide abstrak manusia (*nominalism*) yang dengan sendirinya melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang abstrak. Sebaliknya, pandangan yang kedua menganggap bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang konkret dan nyata (*realism*). Kedua pandangan ini dalam wacana kemodernan bersifat saling meniadakan. Dan, dalam mainstream wacana kemodernan, pandangan kedua, yaitu *realism*, menduduki posisi sentral, sehingga bukan suatu hal yang aneh bila *nominalism* berada pada posisi marginal. Hal ini juga tidak terlepas dari pengertian dari hakikat manusia sebagai makhluk “terikat”. Pengertian manusia sebagai makhluk terikat (dan pasif) mengakibatkan suatu anggapan bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang sudah *given*. Dengan kata lain, realitas sosial yang ada di sekeliling kehidupan manusia adalah suatu yang sudah terbentuk dan manusia tidak mempunyai daya untuk mengonstruksi atau merekonstruksi realitas sosial yang melingkunginya (yang sebenarnya) mengasingkan dirinya. Akuntansi Syariah yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif dan bertanggung jawab mengklaim bahwa realitas sosial adalah secara aktif diciptakan oleh manusia. Bentuk realitas sosial yang diinginkan oleh Akuntansi Syariah adalah realitas sosial yang humanis, transendental, dan teleologikal. Humanis berarti bahwa realitas sosial yang diciptakan tadi mempunyai karakter kemanusiaan, sehingga ia (realitas sosial) akan sesuai dengan manusia yang ada di dalamnya. Transendental berarti bahwa realitas sosial yang diciptakan, karena diciptakan berdasarkan nilai “ketuhanan” (etika),

sebetulnya tidak terbatas pada manfaat duniawi, tetapi juga ukhrawi (yaitu, setelah kehidupan di dunia). Dan teleologikal mempunyai arti bahwa semuanya itu diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan “puncak” (*the ultimate goal*) kehidupannya, yaitu pencapaian *the pleasure of God*.

Pada lapisan ketiga, epistemologi, Akuntansi Syariah menghendaki adanya perkawinan antara ilmu pengetahuan dan agama, rasio (akal) dan hati nurani, pendekatan empiris dan normatif, untuk menghasilkan pengetahuan (teori) akuntansi yang lebih bersifat humanis, transendental, dan teleologikal. Bagi Akuntansi Syariah mengawinkan ilmu pengetahuan (dalam hal ini adalah pengetahuan (teori) dan praktik akuntansi yang ada pada saat ini) dengan agama adalah bukan suatu hal yang tabu. Bahkan di dunia Barat pun saat ini ada kecenderungan, meskipun masih kecil, untuk menjadikan agama sebagai salah satu sumber inspirasi dalam mengonstruksi ilmu pengetahuan. Ketika Akuntansi Syariah disajikan di Critical Perspectives on Accounting Conference pada 26-28 April 1996 di New York malah mendapat tanggapan positif dari khususnya discussant (dari New Mexico Universit USA) yang mengaku dirinya sebagai seorang atheis.

Dengan pendekatan semacam ini, Akuntansi Syariah akan mampu memberikan nuansa keilmuan yang lebih komprehensif, humanis, transendental" | dan teleologikal. Nuansa keilmuan seperti tersebut di atas memang sangat ? memungkinkan, karena Akuntansi Syariah yang posmodernis—kalau bisa dikatakan begitu—bersifat terbuka dan menerima kemajemukan yang tentunya berbeda dengan epistemologi positivistik modern yang bersifat menunggalkan sesuatu dengan cara menolak “sang lain”. Apa yang ditawarkan oleh Akuntansi Syariah adalah pendekatan filosofis yang akan menjadi pijakan untuk merekonstruksi akuntansi modern agar dapat berwajah lebih komprehensif, humanis, transendental, dan teleologikal.

Penutup

Realitas sosial yang tercipta saat ini adalah realitas sosial yang banyak dipengaruhi oleh semangat kapitalisme sebagai produk dari modernisme yang

mengklaim ilmu pengetahuan (teori ekonomi positivistik dan akuntansi positif, misalnya) harus bebas dari nilai. Akibatnya realitas sosial yang hidup dan berkembang sekarang ini adalah realitas yang kering akan nilai (nilai-nilai etika).

Posmodernisme, melihat keadaan semacam itu, mencoba memberikan pandangan dari luar paradigma modernisme dengan menawarkan konsep dekonstruksi (atau genealogi). Konsep ini pada dasarnya adalah memasukkan “sang lain” ke dalam wacana yang sedang dominan yang selama ini selalu memarginalkan “sang lain” pada posisi yang lebih rendah.

Konsekuensi dari ini adalah bahwa “diri” akuntan, sebagai seorang *agent* yang mempunyai potensi untuk membentuk realitas sosial, harus mampu memasukkan “hati nurani” ke dalam setiap wacana yang sedang digeluti oleh akuntan yang bersangkutan. Seperti telah diketahui bahwa “hati nurani” dalam wacana modernitas selalu dalam posisi marginal, sedangkan pada posisi sentral adalah “rasio”. Dengan menempatkan posisi “hati nurani” yang sejajar dengan “rasio”, “diri” akuntan akan mampu melakukan rekonstruksi akuntansi.

Rekonstruksi akuntansi dipandang perlu, karena akuntansi juga mempunyai kuasa untuk membentuk realitas sosial. Oleh karena realitas sosial yang ingin diciptakan adalah realitas sosial yang humanis, transendental, dan teleologikal, maka rekonstruksi akuntansi harus dilakukan dengan nilai yang sama.

Dalam upaya tersebut, Akuntansi Syariah menawarkan pendekatan filosofis dengan berpegang pada filsafat “berpasangan”, yang tidak lain adalah sebuah prinsip yang menerima adanya kemajemukan dan bersifat terbuka. Dengan pendekatan ini, akuntansi yang direkonstruksi akan menjadi akuntansi yang berwajah lebih komprehensif, humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal.

Daftar Pustaka

- Abdel-Magid, Moustafa F. 1981. The theory of Islamic banking: accounting implications. *The International Journal of Accounting Education and Research* 17 (1): 79-102.
- Andrew, J. and Kaidonis, M. 1996. Accounting for the Environment in Order for It to Count. *Critical Perspectives on Accounting Conference*. April 26-28, New York.

- Arrington, C. Edward and Jere R. Francis. 1989. Letting the cat out of the bag: deconstruction, privilege and accounting research. *Accounting, Organizations and Society* 14(1/2): 1-28.
- Bailey, Derek T. 1988. *Accounting in Socialist Countries*. London: Routledge.
- Chua, Wai Fong and Pieter Degeling. 1993. Interrogating an accounting-based intervention on three axes: instrumental, moral and aesthetic. *Accounting, Organizations and Society* 18 (4): 291-318.
- Chua, Wai Fong. 1988. Interpretive sociology and management accounting research - a critical review. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 1 (2): 59-79.
- Daley, Lane A. and Gerhard G. Mueller. 1989. *Accounting in the arena of world politics: crosscurrents of international standard-setting activities*. In Jagdish Sheth and Abdolreza Eshghi (eds.). *Global Accounting Perspectives*. Cincinnati: South-Western: 21-32.
- Dillard, J. and Yuthas, K. 1996. A Responsibility ethics for audit expert system. *Critical Perspectives on Accounting Conference*. April 26-28, New York.
- Ezzamel, M. and Hoskin, K. 1996. Theorizing the relationship between accounting and the gift. *Critical Perspectives on Accounting Conference*. April 26-28, New York.
- Foucault, M. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- . 1987. *Nietzsche, genealogy, history*. In Michael T. Gibson (ed.). *Interpreting Politics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Francis, Jere R. 1990. After virtue? accounting as a moral and discursive practice. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3 (3): 5-17.
- Gambling, Trevor and Rifaat Ahmed Abdel Karim. 1986. Islam and social accounting. *Journal of Business Finance & Accounting* 13 (1): 39-50.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 1994. "Theatrum Politicum": Posmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia. *Kalam*. Edisi 1: 23-31.
- Hewitt, John P.. 1989b. The sociopolitical paradigm in financial accounting research. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 2 (1): 52-76.
- Hofstede. G. 1987. The cultural context of accounting. In Barry E Cushing (ed.). *Accounting and Culture*. Sarasota: American Accounting Association: 1-11.
- Hopwood, Anthony G. 1987. The archaeology of accounting systems. *Accounting, Organizations and Society* 12 (3): 207-34.
- Laughlin, R. 1988. Accounting in its social context: an analysis of the accounting system of the Church of England. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 1 (2): 19-42.
- . 1990. A model of financial accountability and the Church of England. *Financial Accountability and Management* 6 (2): 93-114.
- O'leary, Ted. 1985. Observations on corporate financial reporting in the name of politics. *Accounting, Organizations and Society* 10 (1): 87-102.

- Perera, M. H. B. 1989. Towards a framework to analyze the impact of culture on accounting. *The International Journal of Accounting* 24 (1): 42-56.
- Preston, Alistair. 1986. Interactions and arrangements in the process of informing. *Accounting, Organizations and Society* 11 (6): 521-40.
- Procacci, Giovanna. 1991. *Social economy and the government of poverty*. In Graaham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller (eds.). *The Fou-cault Ejjffect: Studies in Governmentality*. Chicago: the University of Chicago Press.
- Riahi-Belkaoui, Ahmed and Ronald D Picur. 1991. Cultural determinism and the perception of accounting concepts. *The International Journal of Accounting* 26 (2): 118-30.
- Rosenau, Pauline Marie. 1992. *Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sahal, Ahmad. 1994. Kemudian, di manakah emansipasi? tentang teori kritis, genealogi, dan dekonstruksi. *Kalam* edisi 1: 12-22.
- Solomons, D. 1983. The political implications of accounting and accounting standard setting. *Accounting and Business Research* 13 (50): 107-18.
- Sugiharto, I. Bambang. 1996. *Posmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tinker, A.M 1984. Theories of the state and the state of accounting: economic reductionism and political voluntarism in accounting regulation theory. *Journal of Accounting and Public Policy* 3: 55-74.
- _____. 1985. *Paper Prophets: A Social Critique of Accounting*. New York: Praeger.
- _____, B. D. Merino and M. D. Neimark. 1982. The normative origins of positive theories: ideology and accounting thought. *Accounting, Organizations and Society* 7 (2): 167-200.
- _____. 1980. A political economy of accounting. *Accounting, Organizations and Society* 5 (1): 147-60.
- Tomkins, C. and Roger Groves. 1983. The everyday accountant and researching his reality. *Accounting, Organizations and Society* 8 (4): 361-74.
- Triyuwono, I. 1996. Shari'ate accounting: an ethical construction of accounting knowledge. *Critical Perspectives on Accounting Conference*, New York, April 26-28.
- Watts, Ross L. and Jerold L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- _____. 1990. Positive accounting theory: a ten year perspective. *The Accounting Review* 65 (1): 131-156.